

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu fenomena permasalahan umum yang sering terjadi di Indonesia baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila ditinjau secara lebih luas, permasalahan kesehatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah-satunya yaitu karena dipengaruhi oleh tingginya tingkat kemiskinan. Konsep kemiskinan sebetulnya bukan hanya tentang rendahnya kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dikarenakan kurangnya pendapatan. Tetapi bisa juga karena kondisi suatu daerah yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya akibat dari rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan (Jacobus et al, 2018).

Kemiskinan berpotensi besar terhadap tingkat kesehatan yang rendah. Sebagaimana dinyatakan oleh World Bank (2002) bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Dimana buruknya kondisi kesehatan suatu daerah secara tidak langsung membawa dampak terhadap penurunan produktivitas dan penurunan kualitas hidup sehingga menciptakan kemiskinan, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi tiap manusia, karena tanpa adanya kesehatan yang layak masyarakat tidak dapat menghasilkan produktivitas optimal. Human capital dapat diukur melalui kesehatan, karena kesadaran akan kesehatan memiliki keterkaitan dengan produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam pengukuran human capital, kesehatan dapat menggunakan nilai Angka Harapan Hidup, dimana semakin tinggi angka harapan hidup seseorang maka semakin berkualitas parameter kesehatannya, dan sebaliknya(Todaro (2000:115)).

Permasalahan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir ini yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah penanganan masalah anak pendek atau yang lebih dikenal dengan istilah stunting. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan meningkatnya kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Unicef, 2013). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Angka stunting tersebut mencapai 36,4 persen. Namun, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 angkanya terus menurun hingga 23,6 persen (Novianto, 2019).Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif dalam memerangi stunting (Kertaradjasa, 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menanggulangi Stunting adalah ditetapkannya Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Peraturan menyatakan bahwa setiap Desa harus memprioritaskan pembangunan di Desa masing-masing,

salah satunya adalah pembangunan dalam sektor kesehatan, seperti penanggulangan dan pencegahan stunting yang menjadi salah satu kegiatan prioritas. Kegiatan dapat dilakukan dengan cara melibatkan warga Desa agar terlibat aktif dan inovatif dalam menghadirkan beragam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan stunting (Prihantini & Subanda, 2020).

Pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Selanjutnya lewat Rembuk Stunting Desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terkait.

Dukungan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.

Kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan Balai Pengobatan Desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi

gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.

Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki 15 desa, di mana Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang merupakan tiga (3) di antaranya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih ketiga desa ini karena di samping desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang merupakan desa yang termasuk dalam kategori desa yang memiliki masyarakat penderita stunting juga karena letak geografis ketiga desa yang berhimpitan sehingga memudahkan sebagai pembandingan dalam konteks pengelolaan keuangan dalam konteks upaya peredaman penurunan stunting daripada tiga (3) yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat yang tidak jauh berbeda nyata. Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa diharapkan dapat dikelola dengan baik, terutama pengelolaan dana desa yang dianggarkan untuk pencegahan stunting. Adapun rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk pemberantasan stunting dan jumlah kasus stunting yang terjadi di ketiga desa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa untuk Penanganan Stunting tahun 2019-2022

Tahun	Desa		
	Bangka Kantar	Golo Kantar	Nanga Labang
2019	Rp. 5.000.000	Rp. 2.400.000	Rp. 24.000.000
2020	-	-	-
2021	Rp. 6.300.000	Rp. 2.900.000	Rp. 70.030.000
2022	Rp. 5.000.000	Rp. 11.300.000	Rp. 95.465.000
Total	Rp. 16.300.000	Rp. 16.600.000	Rp. 189.495.000

Sumber Data : Pemerintah Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Agustus 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya jumlah dana desa yang digunakan untuk penanganan stunting di ketiga desa setiap tahunnya tidak tetap terhitung sejak tahun 2019-2022. Dana desa ini nantinya akan digunakan untuk membiayai setiap program untuk penanganan stunting. Dana desa ini disesuaikan dengan banyaknya jumlah kasus stunting yang terjadi di masing-masing ketiga desa ini. Adapun banyaknya jumlah kasusu stunting di ketiga desa ini terhitung sejak tahun 2019-2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Stunting tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus		
	Bangka Kantar	Golo Kantar	Nanga Labang
2019	13	1	9
2020	12	-	7
2021	19	2	15
2022	18	2	11
Total	62	5	32

Sumber Data : Pemerintah Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Agustus 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus stunting di ketiga desa setiap tahunnya tidak tetap. Di mana dari ketiga desa kasus stunting paling banyak terjadi di desa Bangka Kantar dan kasus paling sedikit terjadi pada desa Golo Kantar

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas, diketahui bahwa total dana desa yang digunakan untuk pemberantasan stunting di desa Bangka Kantar dari tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebesar Rp.16.300.000 dengan total kasus stunting sebanyak 62 kasus. Untuk desa Golo Kantar, total dana desa yang digunakan untuk pemberantasan stunting adalah sebesar Rp.16.600.000 dengan total kasus sebanyak 5 kasus. Sedangkan untuk desa Nanga Labang, total dana desa yang digunakan untuk pemberantasan stunting adalah sebesar

Rp.190.495.000 dengan total kasus sebanyak 32 kasus. Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa permasalahan yang muncul adalah desa Bangka Kantar memiliki jumlah kasus stunting lebih besar dibandingkan dengan desa Nanga Labang dan Golo Kantar, namun alokasi dana desa untuk penanganan stunting untuk Desa Bangka Kantar lebih sedikit jika dibandingkan dengan Desa Nanga Labang dan Golo Kantar.

Sehubungan dengan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Penurunan Stunting Di Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Kabupaten Manggarai Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Penurunan Stunting di Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa Memberikan Dampak terhadap Upaya Penurunan Stunting di Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Penurunan Stunting di desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

3. Untuk mengetahui Dampak Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Penurunan Stunting di Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan dana desa khususnya dalam upaya penurunan stunting.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa dalam upaya penurunan stunting.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pengelolaan dana desa khususnya pengelolaan dana desa dalam upaya penurunan stunting.